

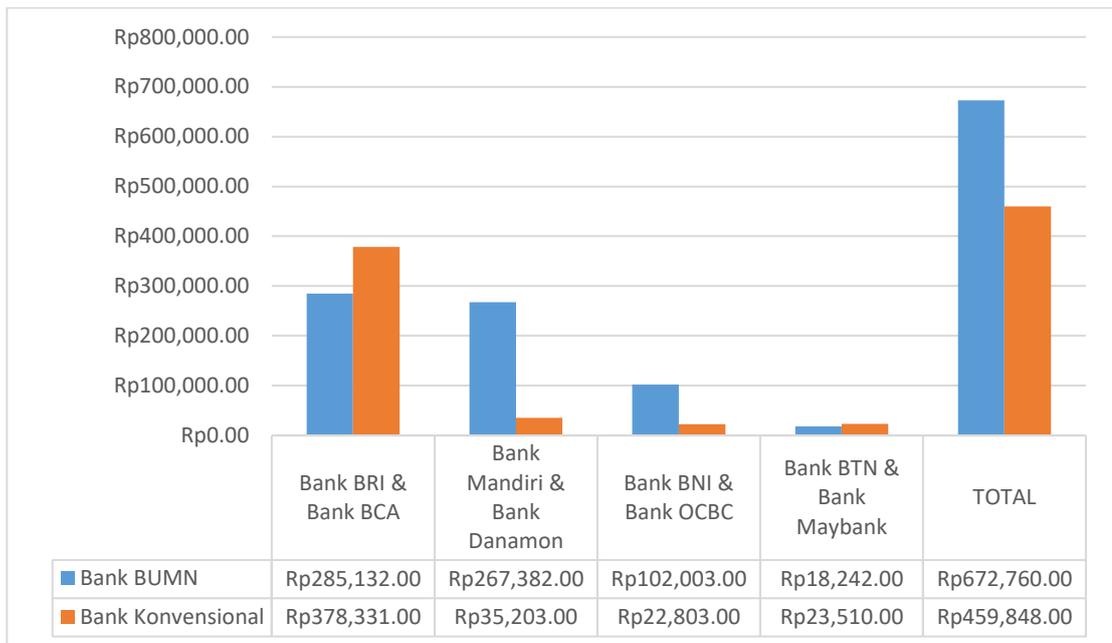
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Fungsi dan peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak, penghasil devisa negara, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha, dan sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Badan Usaha Milik Negara memiliki dua bentuk badan hukum perusahaan, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan perseroan (Persero) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tugasnya Persero dijalankan oleh organ-organ Persero, yaitu: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 2) Direksi, dan 3) Komisaris. Sedangkan badan usaha umum (Perum) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Walaupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua bentuk hukum perusahaan, namun sampai tahun 2017 hanya Persero yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Saham Ok, 2019).



Gambar 1.1
Kapitalisasi Pasar BEI (Dalam Ratusan Juta)

Sumber : (Saham Ok, 2019)

Bank Badan Usaha Milik Negara sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perbankan di Indonesia. Ada empat bank yang menguasai perbankan BUMN diantaranya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan pada gambar 1.1 dapat dilihat total keseluruhan bank yang terdaftar di BEI, Bank BUMN berhasil menguasai 51% kapitalisasi pasar BEI tahun 2016 (Saham Ok, 2019)

1.2 Latar Belakang Penelitian

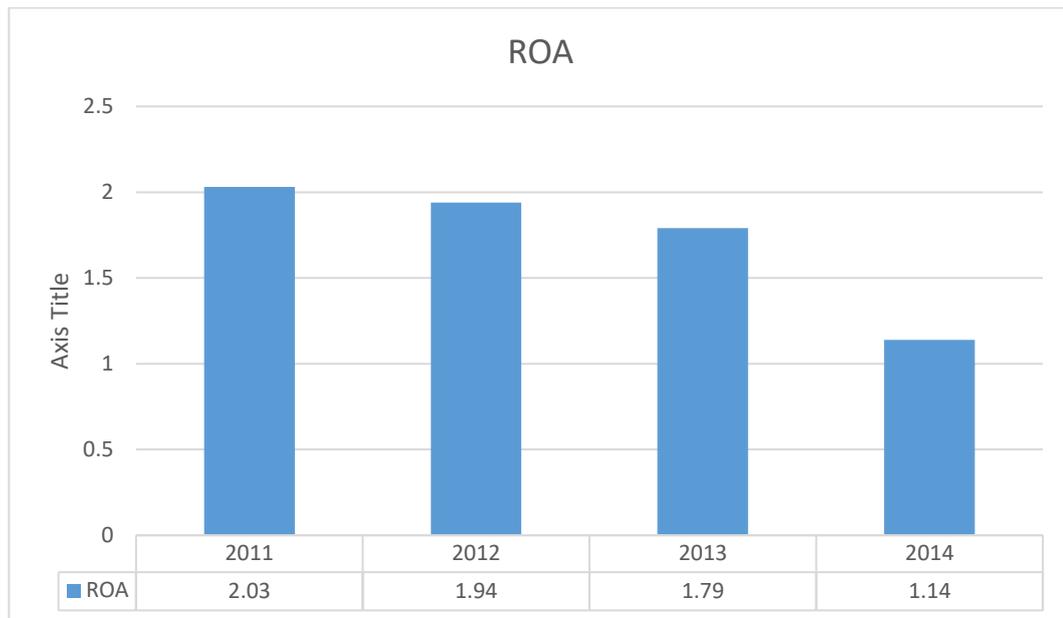
Banyak yang menilai kelayakan atau nilai dari perusahaan atau organisasi berdasarkan kinerja keuangan, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Karena pada dasarnya tujuan kinerja adalah untuk memotivasi personil mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Chairany & Lestari, 2011).

Dengan penerapan PBI No. 13/1 / PBI / 2011 untuk menilai tingkat kesehatan bank mulai tahun 2012, tingkat kesehatan bank harus diukur, misalnya mereka

harus melakukan penilaian sendiri terhadap faktor-faktor: *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings*, dan *Capital*. Karena bank direkomendasikan untuk melakukan perbaikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh BI, harus ada beberapa perbaikan terutama untuk bank umum. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, untuk mengetahui besarnya pertumbuhan kinerja keuangan pada beberapa bank berikut dapat dilihat dari Return on Asset (ROA) yang mewakili pengukuran untuk aspek Laba Perusahaan atau Rentabilitas (Earnings)

Terdapat juga masalah-masalah yang akan muncul pada kinerja keuangan seperti kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kecurangan ini dapat berupa perilaku memanipulasi secara sengaja laporan keuangan sehingga menyesatkan penggunaannya dengan tujuan menghancurkan perusahaan atau untuk mengambil keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Masalah ini bisa diatasi dengan diterapkannya salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, dengan tingginya tingkat keterbukaan atas laporan keuangan perusahaan maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya manipulasi atau kecurangan.

Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi di antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidakkonsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul (Zakarsyi, 2008). Dengan adanya GCG, hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dapat diatur dan diselaraskan dalam sebuah sistem demi tercapainya tujuan perusahaan.



Gambar 1.2

Return on Asset (ROA) Pada Bank BTN

Bank Indonesia telah menetapkan batas minimum ROA yaitu sebesar 1.5% dalam Surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/ Tahun 2004. Pada Tabel 1.1 merupakan data rasio ROA pada bank BTN. Seperti yang dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa beberapa bank mengalami penurunan ROA bahkan melebihi batas minimum 1.5%. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa perolehan laba yang tidak stabil dapat berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana cadangan untuk menutupi masalah likuidasi yang dihadapi akibat dari krisis tersebut. Karena ketika masyarakat melakukan penarikan dana, bank harus menyediakan aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi penarikan dana tersebut, dan apabila aktiva lancar bank tidak mencukupi maka bank akan mengambil dana cadangan dari profit atau laba untuk menutupinya. Selain untuk menopang kebutuhan dana cadangan, ROA juga merepresentasikan kinerja keuangan bank tersebut melalui pendapatan laba dari pengolahan aktivanya, pengolahan aktiva bank termasuk diantaranya adalah pengolahan kredit bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas tata kelola perusahaan yang dijalankan bank-bank tersebut apakah efektif atau tidak

Pentingnya *corporate governance* mulai disadari oleh masyarakat, para stockholder, pemerintah dan manajemen perusahaan untuk mendukung kesuksesan serta peningkatan kesejahteraan perusahaan dan masyarakat luas. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Dengan konsep ini diharapkan masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat teratasi dengan membenahi *Good Corporate Governance* yang merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sedangkan kesejahteraan pemilik serta pemegang saham merupakan tujuan terpenting dalam perusahaan, dasar teori *good corporate governance* adalah *agency theory* yaitu merupakan masalah muncul ketika pengelola perusahaan terpisah dari pemiliknya hakikatnya seorang pemilik ingin memiliki laba yang tinggi sedangkan dengan adanya kewenangan manager dalam mengelola dana investor membuat manager dapat memanfaatkan untuk memperkaya dirinya sendiri (www.sindonews.com).

Pembobolan Citibank pada tanggal 27 juli 2015 sebesar 17 miliar kejahatan ini dilakukan oleh senior manager Citibank yaitu Malinda Dee hal ini tercemin dari menurunnya laba bersih yang ada pada Citibank pada tahun 2014 dengan laba bersih sebesar Rp.2.505 triliun menurun menjadi Rp.1.567 triliun pada tahun 2015, selain itu pada tanggal 9 maret 2017 di (www.detik.com) terdapat kasus pembobolan 7 bank dengan kerugian Rp. 836 miliar dengan modus mengajukan kredit ke 7 bank dengan cara mempengaruhi manager bank untuk melakukan penyimpangan. Dari bedasarkan 2 kasus tersebut berpengaruh terhadap pengukuran GCG yaitu dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit karena keterlibatannya orang dalam perusahaan.

Kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat didalam setiap perusahaan. Kesadaran itu diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya (Adrian & Sutedi, 2012). Banyak manfaat dari penerapan *corporate governance* yang baik untuk kinerja perusahaan, diantaranya peningkatan kinerja

perusahaan karena melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional perusahaan, dan peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Pengaruh *corporate governance* yang baik juga akan meningkatkan transparansi akan laporan keuangan yang akan menunjukkan kinerja perusahaan.

Terdapat 4 mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Proksi GCG yang pertama adalah kepemilikan institusional. Menurut Istiantoro *et al.*, (2017) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan perusahaan dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi mekanisme *corporate governance* suatu perusahaan (Berthelot *et al.*, 2010). Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan laba yang maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk mengontrol manajemen dan meningkatkan kinerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Porter (1992) dalam Sekaredi (2011) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme penerapan *corporate governance* yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak *investor* dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jumlah anggota dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan dikarenakan dewan direksi bertanggung jawab atas tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan laba dalam perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham sehingga investor mempunyai pertimbangan dalam kegiatan investasi jangka panjang. Dari hasil yang dilakukan Sekaredi (2011) diperoleh

antara hubungan dewan direksi dengan kinerja keuangan perusahaan ditolak karena dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dari penelitin yang dilakukan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat *good corporate governance* dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Komisaris independen keberadaannya sangat penting dalam konsep penerapan tata kelola perusahaan. Semakin tinggi komisaris independen yang dimiliki sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena komisaris independen dapat memberikan masukan kepada manajer perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Baysinger et al., (1991) dalam Sekaredi (2011) menyatakan bahwa adanya komisaris independen tidak berpengaruh (tidak meningkatkan) terhadap kinerja keuangan, sementara Malelak dan Basana (2015) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dan menemukan bahwa peningkatan jumlah komisaris independen berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena keberadaan komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan direksi agar sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Proksi GCG yang terakhir adalah komite audit. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan *good corporate governance*. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian manajemen akan jujur mengelola perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara menurut Xie et al. (2003) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen laba dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum BUMN Periode 2011-2018)**”.

1.3 Rumusan Masalah

Kemampuan bank dalam mengelola uang masyarakat merupakan dasar penelitian dalam kinerja keuangan dengan melihat tingkat profitabilitasnya dalam menilai kinerja keuangan. Banyak masyarakat mencari aman dengan mempercayakan uang disimpan pada Bank BUMN dikarenakan pernah terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan penutupan Bank swasta yang terdapat di Indonesia pada tahun tersebut. Masyarakat menganggap bank BUMN tidak akan mengalami penutupan sepanjang negara ini masih berdiri, dan juga bank Indonesia menetapkan minimum ROA 1,5% perusahaan akan dikatakan mengalami masalah jika ROA dibawah angka tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 Bank BTN mengalami penurunan ROA melebihi dari 1,5%

Dari masalah diatas peneliti ingin meneliti faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu *good corporate governance* terutama di perusahaan bank BUMN pada tahun 2011-2018.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan diuji lebih lanjut di penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan instisional, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2018?
3. Pengaruh secara parsial Kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018?

4. Pengaruh secara parsial Dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018?
5. Pengaruh secara parsial Komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018?
6. Pengaruh secara parsial Komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.
4. Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.
5. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.
6. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan. Selain itu, memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan sumber dan teori untuk kepentingan diantaranya,

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai good governance dan leverage, dan kinerja keuangan perusahaan perbankan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah mengenai hubungan antara good corporate governance dan leverage dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Dapat menjadi masukan bagi manajemen perbankan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan
2. Dalam praktik perbankan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan suatu pola dalam penyusunan tugas akhir untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan isi dilakukannya penelitian ini. Maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti

berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian dan teknik penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data yang menyangkut mengenai variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data serta teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran dari hasil penelitian yang dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian sejenis di masa mendata.